

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah mekanisme di mana pemerintah daerah serta penduduknya mengontrol adanya sumber daya serta menata acuan kemitraan antara pemerintah daerah dan juga sektor swasta demi memanifestasikan kesempatan kerja serta membangkitkan pertumbuhan aktivitas ekonomi di daerah tersebut (Riyandi & Woyanti, 2022). Adapun asas mengenai pembangunan daerah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan pemerintah daerah yakni desentralisasi.

Desentralisasi ialah pengalihan wewenang mulai dari pemerintah pusat terhadap daerah otonomi yang bertujuan untuk menyelenggarakan serta mengkoordinasikan pemerintahan dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dikatakan tercapai apabila suatu daerah bisa menjalankan otonomi daerah yang mampu mengurus serta mengendalikan pengelolaan pemerintahan dengan sebaik mungkin. Desentralisasi memiliki tujuan untuk mengoptimalkan ketentraman serta perlindungan penduduk, memajukan peningkatan ekonomi daerah, memaksimalkan kegiatan demokrasi, kesamarataan serta menjaga interaksi yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada saat menjalankan desentralisasi, terdapat filosofi yakni *money follow function* sebagai landasan utama yang perlu diamati serta dilakukan (Azwar, 2022; Fatoni, 2020). Landasan tersebut memuat arti bahwa apapun bentuk pengalihan wewenang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah diikuti dengan

pelimpahan sumber kapitalisasi (Azwar, 2022). Jadi, desentralisasi mampu mengoptimalkan kemampuan, keberhasilan, keterbukaan serta tanggung jawab dalam mengurus keuangan pemerintah (Fatoni, 2020).

Implementasi daerah otonom baik itu provinsi, kota maupun kabupaten, pemerintah pusat harus bisa menyerahkan kedaulatan pada pemerintah daerah untuk memanfaatkan semua sumber pendanaan di kawasannya. Pemerintah menyelenggarakan berbagai macam program kebijakan desentralisasi sebagai usaha untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi ialah meningkatkan penghasilan pada periode tertentu serta memperlihatkan adanya kenaikan dari volume produksi ataupun jasa dalam periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dominan memperlihatkan transisi yang bersifat kuantitatif serta umumnya dihitung dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau penghasilan atau nilai akhir pasar dari barang akhir serta jasa yang di peroleh dari perekonomian selama periode tertentu. Tingginya PDRB maka tinggi juga tingkat kesejahteraan penduduk yang artinya pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Namun sebaliknya, rendahnya PDRB maka rendah juga tingkat kesejahteraan penduduk yang berarti pertumbuhan ekonomi juga semakin menurun (Fajri, 2021).

Kota Batam merupakan salah satu kota dari Kepulauan Riau yang tingkat laju pertumbuhan ekonominya masih berfluktuasi. Batam berkembang dengan pesat menjadi daerah industri, perdagangan, galangan kapal serta daerah pariwisata di Indonesia yang memiliki nilai jual dan tenaga kerja yang cukup dengan jumlah

instansi memperoleh ribuan perusahaan. Tabel 1.1 berikut merupakan data tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB tahun 2017 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 1.1 PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2022

Tahun	PDRB atas Harga Konstan (Rp Milyar)	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2017	97.863	2,61
2018	102.719	4,96
2019	108.800	5,92
2020	106.030	-2,55
2021	111.069	4,75
2022	118.665	6,84

Sumber: batamkota.bps.go.id

Tabel 1.1 di atas menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam tidak konsisten selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari nilai PDRB Kota Batam dari tahun 2017 sampai tahun 2022 tidak secara konsisten bertumbuh. PDRB pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 secara berturut-turut mengalami pertumbuhan dari 2,61%, 4,96% hingga 5,92%. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi -2,55%, ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak besar pada perekonomian Indonesia termasuk Kota Batam. PDRB Kota Batam kembali meningkat pada tahun 2021 sampai tahun 2022 yakni sebesar 4,96% hingga 6,84%.

Ada banyak faktor penyebab pertumbuhan ekonomi daerah naik ataupun turun, salah satunya yakni pendapatan daerah yang diukur dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan serta di ambil oleh daerah menurut kebijakan masing-masing daerah. Beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah benar-benar bermanfaat dalam mengembangkan

pembangunan ekonomi sekarang, namun ketika masa pandemi, struktur dari Pendapatan Asli Daerah seperti pajak mengalami kemerosotan (Pamukti & Bawono, 2022; Sinaga *et al.*, 2020). PAD yang meningkat secara berkelanjutan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD yang tinggi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun sebaliknya, jika PAD rendah secara berkelanjutan maka akan menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketika PAD turun, maka pertumbuhan ekonomi daerahnya kurang baik.

PAD yang merupakan kontribusi bagi pendapatan daerah Batam mengalami naik dan turun pada setiap periode. Walaupun masih terbawa akan dampak Pandemi Covid-19, namun di tahun 2022 pemerintah kota Batam hampir menggapai target terhadap program pendapatan daerah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah belum bisa menggapai target program pendapatan daerah yaitu peraturan insentif yang diterbitkan pemerintah kota Batam, yakni tambahan masa tempo, pemotongan piutang utama serta penghapusan sanksi administrasi seperti denda PBB-P2 serta bunga. Tabel 1.2 berikut merupakan data realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2017 - 2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp Milyar)		
	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
2017	1.160,20	974,12	83.96
2018	1.258,16	1.084,64	86.21
2019	1.350,51	1.147,69	84.98
2020	1.499,54	975,28	65.04
2021	1.432,64	1.094,02	76.36
2022	1.602,05	1.284,91	80.20

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 1.2 sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam selama lima tahun selalu di bawah 100%. Hal ini terlihat dari nilai APBD Kota Batam dari tahun 2017 sampai tahun 2022 tidak secara konsisten meningkat. Pada tahun 2017 hingga tahun 2022 PAD secara berturut-turut mengalami peningkatan dari 974,12 juta, 1.084,64 miliar hingga 1.147,69 miliar. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 975,28 juta, ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak besar pada perekonomian Batam. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam kembali meningkat pada tahun 2021 hingga tahun 2022 sebesar 1.094,02 miliar hingga 1.284,91 miliar.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ayu & Septiani (2019) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian yang sama juga didapat dalam temuan yang dikerjakan oleh Ariana *et al.* (2019), Mokorowu *et al.* (2019), Wahyuni (2020), Harahap (2019), Pamukti & Bawono (2022), Saputera & Pandoyo (2020) dan Yasin (2020). Namun penelitian yang dilakukan oleh Paat *et al.* (2019) dan AlQomariah *et al.* (2022) menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan dana milik APBN yang ditujukan untuk keseimbangan kemampuan finansial antar daerah dalam menanggung kepentingan pembelanjaan yang berkaitan pada pelaksanaan desentralisasi (Harahap *et al.*, 2019). Dana Alokasi Umum digunakan untuk

membantu daerah dalam mendanai kegiatan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah (Yuliantoni & Arza, 2021).

DAU dialokasikan kepada daerah dalam rangka menutup defisit anggaran masing-masing daerah selama satu tahun anggaran serta menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (BPKAD Kabupaten Kuningan, 2023). Pertumbuhan perekonomian daerah juga dapat meningkat apabila pemerintah daerah memperoleh Dana Alokasi Umum yang lebih tinggi.

Menurut penelitian Ayu & Septiani (2019) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan pemerintah daerah akan memanfaatkan dana transfer yang mereka terima untuk mendanai proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Hasil penelitian yang sama juga didapat dalam temuan yang dikerjakan oleh Mokokrowu *et al.* (2019), Wahyuni (2020), Paat *et al.* (2019), Pamukti & Bawono (2022) dan Harahap *et al.* (2019). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariana *et al.* (2019) dan Saputera & Pandoyo (2020), yaitu Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan kurang maksimal pengalokasian realisasi Dana Alokasi Umum bagi pengeluaran pemerintah daerah.

Waskito *et al.* (2019) menyatakan Dana Bagi Hasil juga merupakan dana transfer yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah secara proposional untuk memenuhi kebutuhan keuangannya dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang dialokasikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk meminimalisir ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka mengendalikan eksternalitas negatif dan mendukung peningkatan pemerataan di suatu daerah (Rodani, 2022). Dana Bagi Hasil yang lebih tinggi dapat berdampak pada penyediaan lebih banyak layanan publik, yang akan membantu mendanai inisiatif pemerintah dan meningkatkan perekonomian.

Menurut penelitian AlQomariah *et al.* (2022), Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan pemerintah daerah akan memanfaatkan dana transfer yang mereka terima untuk mendanai proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Hasil penelitian yang sama juga didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Septiani (2019). Namun berbeda dengan temuan yang dikerjakan Ariana *et al.* (2019) dan Mokerowu *et al.* (2019), yaitu Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Terkait permasalahan yang sudah dijabarkan oleh peneliti di atas serta terdapat ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah peneliti jabarkan di latar belakang, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Rendahnya PDRB daerah dapat mengakibatkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi menurun.
2. PAD kota Batam yang cenderung turun dari tahun ke tahun sehingga memperlambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Kurangnya memaksimalkan pengalokasian realisasi Dana Alokasi Umum serta Dana Bagi Hasil dalam pengeluaran pemerintah daerah.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang terdapat di latar belakang, ada beberapa poin yang penulis bahas sesuai dengan permasalahan yang ada. Berikut ini batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Variabel independen yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Variabel dependen yang dipakai pada penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi.
- b. Penelitian ini hanya menguraikan data yang diperoleh pada tahun 2017-2022 dikarenakan data tersebut merupakan data terbaru mengenai keempat variabel yang terdapat dalam penelitian ini.
- c. Lokasi penelitiannya berada di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada konteks tersebut, penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam?
3. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam?

1.5 Tujuan Masalah

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.

4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam temuan ini antara lain:

1. Hasil dari penelitian ini semoga bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta memperdalam wawasan dalam menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam.
2. Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa saling melengkapi untuk penelitian sebelumnya serta bisa digunakan sebagai referensi dan juga informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
3. Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan daerah, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam mengendalikan kegiatan pemerintah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penulis juga berharap agar pihak yang melakukan kajian dan memberikan temuan mengenai pertumbuhan ekonomi akan mendapatkan manfaat secara praktis, yakni:

1. Untuk Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis seperti pemahaman dan wawasan yang lebih dalam tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

2. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan kepada pemerintah daerah agar bisa memaksimalkan potensi lokal daerah agar dapat mengembangkan mutu fasilitas publik untuk pembangunan daerah.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini bisa menambah pemahaman serta memberikan hasil dari spekulasi di bidang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batam Tahun 2017-2022 dan juga bisa diaplikasikan menjadi informasi dengan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.